

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN



Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-I pelaksanaan Rencana Strategis DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2024 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN. Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana

di lingkungan DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 06 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN**



MOHAMMAD RASULI, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 197006261993021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	36
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN..

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

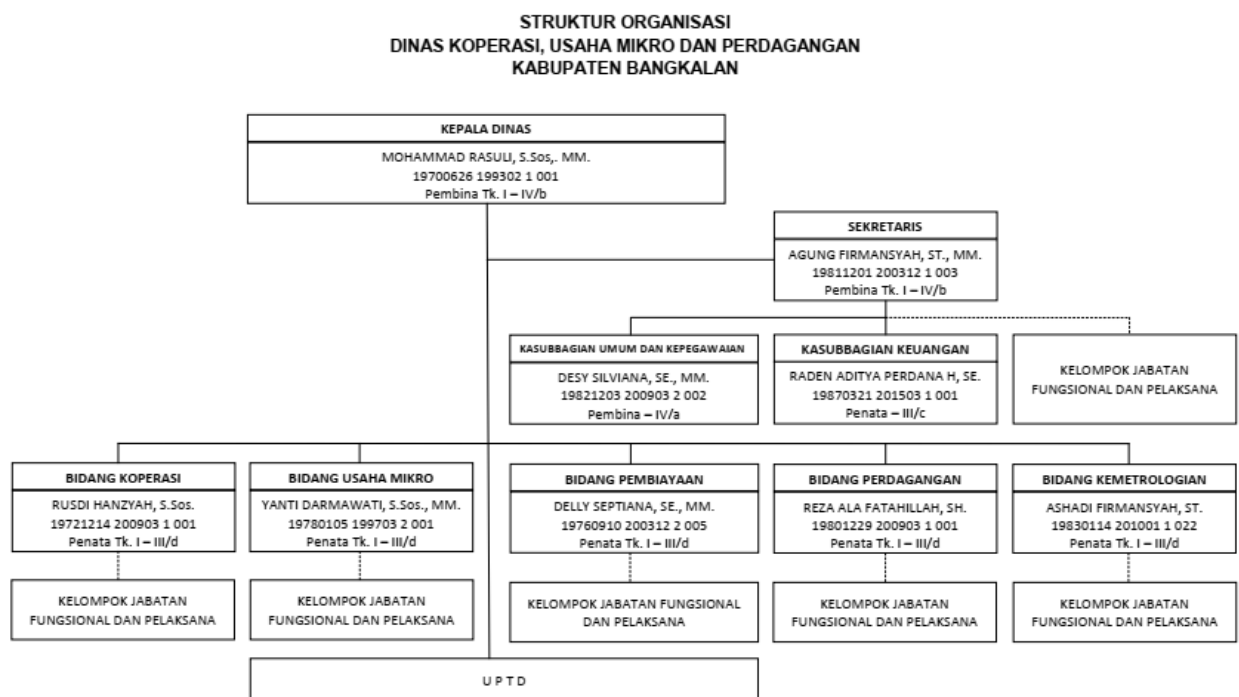
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
serta Kemetrolagian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serta Kemetrolagian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
serta Kemetrolagian;
- d. Pelaksanaan fungsi administrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan
serta Kemetrolagian

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan serta Kemetrolagian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan.

Gambar 1.1



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Kurang berkembangnya jiwa kewirausahaan dilingkungan pengelola koperasi dan Usaha Mikro, sehingga mengakibatkan lemahnya inovasi, kreativitas dan produktifitas.
2. Lemahnya Permodalan yang dimiliki koperasi sehingga sulit melakukan pengembangan usaha
3. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar
4. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk
5. Kurangnya informasi perdagangan yang dapat diakses oleh masyarakat.
6. Pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
7. Kondisi Pasar Tradisional yang kurang nyaman untuk melaksanakan kegiatan jual beli di Pasar.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian

Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Percepatan pembinaan untuk pendirian, pengelolaan dan pengawasan KDKMP, dengan total jumlah 281 KDKMP. Sehingga Kab. Bangkalan menerima penghargaan “Tokoh Pembina Koperasi” karena masuk dalam 5 Kab/Kota tercepat pendirian KDKMP se-Jawa Timur.
2. Melaksanakan pelatihan dalam mengelola produk unggulan, serta pelatihan pengemasan dan pemasaran bagi para pelaku usaha mikro
3. Peningkatan informasi perdagangan dengan menciptakan inovasi informasi harga BAPOKTING yang update setiap hari di akun sosial media Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.
4. Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal.
5. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan ini disusun berdasarkan beberapalandasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERDAGANGAN Tahun 2025 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN . Rencana Strategis DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76)

Penyusunan Renstra DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2024 - 2028 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2025-2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT RELIGIUS, BERDAYA SAING, ADIL
DAN SEJAHTERA”**

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Bangkalan sebagaimana dikemukakan diatas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan mengemban Misi ke-5 yaitu :

“Memaksimalkan Potensi Daerah Untuk Menunjang Ekonomi Lokal dan Mewujudkan Daerah Ramah Investasi (Bangkalan Potensial dan Mandiri)”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2025 - 2029 sebanyak satu tujuan dan tiga sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATO R KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan produktivitas Usaha Ekonomi Rakyat dan Nilai Tabah Penyelenggaraan Perdagangan	1.1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	98 %	98.10 %	98.25 %
		1.2	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan	Persentase meningkatnya pasar rakyat	55,17 %	58,62 %	62,07 %

			daya saing sektor perdagangan	yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi			
		1.3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	86	86'5	87
				Nilai SAKIP PD	60	62	64

Sumber : Renstra DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN periode 2024 - 2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
I	Meningkatkan produktivitas Usaha Ekonomi Rakyat dan Nilai Tabah Penyelenggaraan Perdagangan	I.I	Pertumbuhan Omset Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase	Untuk mengetahui peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas $\sum \frac{\text{Omset tahun (N-0)} - \text{Omset tahun (N-1)}}{\text{Omset tahun (N-1)}} \times 100$	Diskopu mdag
		I.II	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	Persentase	Untuk mengetahui Pertumbuhan Pelaku Usaha $\sum \frac{\text{Kondisi tahun sebelumnya} - \text{Target Tahun ini}}{\text{Kondisi tahun Sebelumnya}} \times 100$	Diskopu mdag
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	1.1	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase	Untuk mengetahui persentase peningkatan jumlah koperasi dan usaha mikro yang berkualitas $\sum \frac{\text{Kondisi Tahun Sebelumnya} - \text{Target Tahun Ini}}{\text{Kondisi Tahun Sebelumnya}} \times 100$	Diskopu mdag
2	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	2.1	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	Persentase	Untuk mengetahui pasar rakyat yang layak fungsi di Kab. Bangkalan $\sum \frac{\text{Target Tahun ini}}{\text{Jumlah Pasar}} \times 100$	Diskopu mdag
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	3.1	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	Nilai	Untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pasar Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pasar	Diskopu mdag
		3.2	Nilai SAKIP PD	Nilai	Untuk mengetahui Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil penilaian Tim Sakip Kabupaten Bangkalan	LHE Sakip Diskopu mdag

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan produktivitas Usaha Ekonomi Rakyat dan Nilai Tabah Penyelenggaraan Perdagangan	1.1 Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Prosentase	98.10 %
		1.2 Meningkatkan layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	Prosentase	58,62 %
		1.3 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	Nilai	86,5
			Nilai SAKIP PD	Nilai	62

Sumber : Rencana Kerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada bulan November tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan produktivitas Usaha Ekonomi Rakyat dan Nilai Tabah Penyelenggaraan Perdagangan	Pertumbuhan Omset Koperasi dan Usaha Mikro	0,11 %
		Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	1,03
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	98.10 %
2	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	58,62 %

3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	86,5
		Nilai SAKIP PD	62

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE KUALITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI	14 %
1	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kantor Cabang Yang Diterbitkan Ijinnya	282 Unit Usaha
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	282 Unit Usaha

II	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE JUMLAH KUALITAS USAHA KOPERASI	55 %
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/d ibina	21 Unit Usaha
1	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	6 Unit Usaha
2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERDAYAKAN	35 %
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Usaha Mikro Yang Diberdayakan	248 UM
1	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	248 UM

	kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIKEMBANGKAN	5 %
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan UM yang dikembangkan	200 UM
1	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Terfasilitasi	200 UM
V	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PELAYANAN PASAR	100 %
1	Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase terpenuhinya pelayanan pasar	100 %
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 Unit
2	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Operasi Penertiban dan Pelaksanaan pemuktakhiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	100 %
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen

VI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100 %
1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah	Persentase Penyuluhan Dan Pemberdayaan Konsumen Yang Dilaksanakan	100 %
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan
2	Kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 %
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan
3	Pelaksanaan Operasi Pasar	Jumlah Laporan	1 Laporan

	reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
VII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PELAYANAN TERA/ TERA ULANG ALAT UTPP DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN	100 %
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupatara, Tera Ulang, Dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan	100 %
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	40 Unit
VIII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100 %
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi	100 %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Org/Bln
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan

		Keuangan Akhir Tahun SKPD	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket

		Disediakaan	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakaan	1 Paket
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	100 %
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	6 Laporan

		Disediakan	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100 %
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	1 Unit
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3 Unit
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	98,10 %	87 %	89	Tinggi	Diskop umdag
2	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	58,62 %	62,07 %	106	Sangat Tinggi	Diskop umdag
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	86,5	86,5	100	Sangat Tinggi	e-Sukma
		Nilai SAKIP PD	62	64,60 %	104	Sangat Tinggi	LHE Sakip

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-1	Tahun 2024		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas		98,10 %	87 %	89

2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi		58,62 %	62,07 %	106
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah		86,5	86,5	100
		Nilai SAKIP PD		62	64,60 %	104

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan yaitu :

1. Pada sasaran strategis Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas masih menunjukkan pencapaian yang tinggi
 - Indikator Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas capaian di tahun 2025 tercapai dengan baik yaitu tercapai 89% dari target yang ditetapkan
2. Pada sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan menunjukkan pencapaian
 - Indikator Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi capaian di tahun 2025 tercapai dengan baik yaitu tercapai 106% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 2 pasar yang diperbaiki untuk tahun 2025 dari total 29 pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan
3. Pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menunjukkan pencapaian
 - Indikator pertama yaitu Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah tercapai maksimal sebesar 100%

dari target yang ditetapkan.

- Indikator kedua Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga tercapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 104%

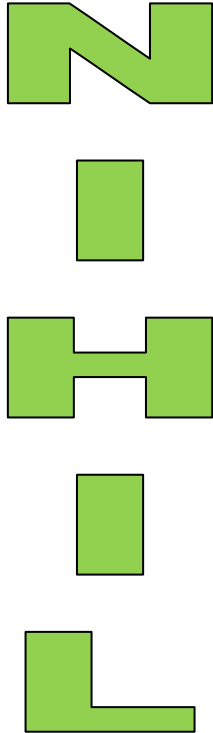
Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	87 %	98,25 %	89 %
2	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	62,07 %	62,07 %	100 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	86,5	87	99 %
		Nilai SAKIP PD	64,60 %	64	101 %

Sebagaimana pada tabel 3.4, maka rata-rata tingkat kemajuan pencapaian indikator sasaran pada tahun 2025 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2026) adalah 97,3%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional 1	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	87 %		
2	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	62,07 %		
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	86,5		
		Nilai SAKIP PD	64,60 %		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	98,10 %	87 %	89	Berhasil	-
2	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	58,62 %	62,07 %	106	Berhasil	-
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	86,5	86,5	100	Berhasil	-
		Nilai SAKIP PD	62	64,60 %	104	Berhasil	-

Dari tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa setiap Sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan pada tahun 2025 berhasil dilaksanakan dengan baik dan tercapai semua target yang sudah ditetapkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
I	MENINGKATKAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG BERKUALITAS	PERSENTASE KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG BERKUALITAS	87 %	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE KUALITAS MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI	100%	
1				Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kantor Cabang Yang Diterbitkan Ijinnya	100%	
1				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	
II				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE JUMLAH KUALITAS USAHA KOPERASI	76%	
1				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dib	76%	

				Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	ina		
1				Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	100%	
2				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	67%	
III				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERDAYAKAN	100%	
1				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Usaha Mikro Yang Diberdayakan	100%	
1				Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang mengikuti Peningkatan	100%	

				Kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kapasitas		
IV				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIKEMBANGKAN	65%	
1				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan UM yang dikembangkan	65%	
1				Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Terfasilitasi	65%	
V	MENINGKATKAN LAYANAN PASAR RAKYAT DAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN	PERSENTASE MENINGKATNYA PASAR RAKYAT YANG MEMILIKI INFRASTRUKTUR YANG LAYAK FUNGSI	62,07 %	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PELAYANAN PASAR	100%	
1				Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase terpenuhinya pelayanan pasar	100%	
1				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	100%	
2				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	

2				Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Operasi Penertiban dan Pelaksanaan pemuktakhiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	100%	
1				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	
VI				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100%	
1				Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah	Persentase Penyuluhan Dan Pemberdayaan Konsumen Yang Dilaksanakan	100%	
1				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	200%	
2				Kegiatan Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	100%	

				Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Barang Penting		
1				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta	100%	
2				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100%	
3				Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta	100%	
VII				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP DALAM RANGKA PERLINDUN	90%	

					GAN KONSUMEN		
1				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupatera, Tera Ulang, Dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan	90%	
1				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	90%	
VIII	MENINGKATKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	INDEK KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	99%	
1		NILAI SAKIP PD	64,60 %	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	
3				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	100%	

				Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
4				Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	
5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	
6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	
7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	100%	

					Perangkat Daerah		
2				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi	100%	
1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	
3				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	
1				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%	
2				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100%	
4				Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	100%	

				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
1				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	
5				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93%	
1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	100%	
2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	100%	
3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakaan	100%	
4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakaan	100%	
5				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	100%	
6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	100%	
7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan	41%	

				dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD		
6				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	100%	
1				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	
7				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
1				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	
2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	
8				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	
1				Penyediaan Jasa	Jumlah	100%	

				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	100%	
3				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	100%	
4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%	

Dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa setiap Program, Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan menunjang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan padatahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	55.000.000	55.000.000	100%
1	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang,	55.000.000	55.000.000	100%

	Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	16.841.115	16.790.630	100%
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.841.115	16.790.630	100%
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	790.000.000	775.150.200	98%
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	790.000.000	775.150.200	98%
4	Program Pengembangan UMKM	284.486.200	274.595.800	97%
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	284.486.200	274.595.800	97%
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.513.131.300	2.497.018.727	99%
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.506.215.000	2.490.353.677	99%
2	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	6.916.300	6.665.050	96%
6	Program Stabilasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.172.500	4.107.900	98%
1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	862.500	825.000	96%

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat pasar kabupaten/Kota	3.310.000	3.282.900	99%
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	6.821.000	6.821.000	100%
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	6.821.000	6.821.000	100%
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.824.298.678	34.455.108.994	99%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	520.400	520.400	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.160.596.493	24.909.056.005	99%
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	130.100	130.100	100%
4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	182.403.200	182.396.250	100%
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.680.330	33.176.350	99%
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.115.400.000	1.110.900.000	100%
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.123.292.747	8.012.677.453	99%
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.275.408	206.252.436	99%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas	98,10 %	87 %	89	1.146.327.315	1.121.536.630	98	0,98
2	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	58,62 %	62,07 %	106	2.524.124.800	2.507.947.627	99	0,99
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan : (Indikator Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah}	86,5	86,5	100	34.824.298.678	34.455.108.994	99	0,99
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan : (Nilai SAKIP PD}	62	64,60 %	104				

Dari tabel 3.9 dapat dijelaskan untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan pada tahun 2025 realisasi anggarannya sebesar Rp38.084.593.251,- dari anggaran yang diperoleh sebesar Rp38.494.750.793,- dengan Program kegiatan terlaksana semua dapat mengefisiensi anggaran sebesar 0,99%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN menetapkan sebanyak dua tujuan, dua sasaran dengan tiga indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 98% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang

Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99% (kategori Sangat Tinggi)
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.494.750.793,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp38.084.593.251,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 99% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Bangkalan, 06 Januari 2026
**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN**



MOHAMMAD RASULI, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 197006261993021001